

## **BKSAP DPR RI Undang Kongres AS Hadiri 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)**

**Jakarta, Indonesia (31/07/2019)** – Dalam rangka memperkuat hubungan yang sudah dibangun selama 70 tahun, utamanya dalam hubungan antar parlemen antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. bertemu delegasi *House Democracy Partnership (HDP)* yang dipimpin oleh anggota kongres AS yang juga merupakan *Chair HDP* David Price, didampingi *Co-Chair HDP* Vern Buchanan, dan anggota delegasi lainnya. Pada kesempatan ini, hadir pula Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E, MBA dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah, S.E.

Sebagai sesama negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dan AS memiliki visi yang sama dalam memajukan nilai-nilai demokrasi, utamanya dalam mempromosikan fungsi parlemen yang responsif, akuntabel, dan transparan. “Demokrasi harus bertujuan membawa kesejahteraan dan perdamaian di masyarakat, bukan perpecahan,” ungkap Dr. Nurhayati. Di samping itu, Dr. Nurhayati yang juga merupakan Presiden Komite *International Human Law (IHL)* pada *Inter Parliamentary Union (IPU) 2016-2019* menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung transisi demokrasi yang damai di Myanmar sebagai perwujudan dari amanah konstitusi untuk turut serta dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; salah satunya dengan berhasil menghadirkan pemerintah Myanmar untuk memberikan transparansi berupa laporan di IPU terkait repatriasi masyarakat Rohingya yang terusir dan mengalami kekerasan.

Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu anggota kongres perempuan AS yang juga merupakan anggota HDP, Susan Davis, terkait tantangan yang dihadapi kedua negara terkait keterwakilan perempuan di parlemen; Dr. Nurhayati menegaskan bahwa melalui penerapan kuota minimal keterwakilan perempuan 30% di seluruh proses politik, mulai dari pencalonan hingga keterwakilan di DPR, DPD, dan DPRD; DPR RI terus berkomitmen untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan keputusan. Walaupun pada prakteknya perempuan yang cenderung memiliki akses

finansial yang terbatas, masih menghadapi tantangan yang cukup berarti dalam proses politik yang membutuhkan banyak dana sehingga kuota 30% sering belum dapat tercapai. “Kita perlu memastikan bahwa perempuan terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan, karena ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sehingga tidak ada seorangpun yang terlewatkan atau *No One Left Behind*”, tandas Dr. Nurhayati.

Pada kesempatan ini, Dr. Nurhayati, selaku *Chair* pada *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* – forum parlemen dunia pertama dan satu-satunya yang membahas mengenai TPB – mengundang Kongres AS untuk hadir pada WPFSD ke-3 yang akan diadakan di Bali pada 4-5 September 2019 mendatang yang akan mengusung tema “*Combating Inequality through Social and Financial Inclusion*”. Tema ini diambil berdasarkan kondisi yang terjadi di seluruh dunia saat ini yang dimana perubahan dinamika politik menimbulkan perubahan kebijakan ekonomi serta perdagangan yang menghasilkan kesenjangan dalam bidang sosial dan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat di dunia.